PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SUBSIDI PEMERINTAH (Studi Pada Laporan Polisi Nomor LP/A/31/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM)

Robby Fitrio, 24151050, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas, 62 halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data dalam penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, dimulai dari penerimaan informasi, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti dan barang bukti, pemeriksaan saksi, penyitaan, penetapan tersangka, penangkapan, hingga penahanan. Hasil penyidikan membuktikan bahwa tersangka membeli BBM bersubsidi menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) yang diperuntukkan bagi kapal nelayan tertentu, namun kemudian mengalihkan BBM tersebut kepada pihak lain yang tidak berhak dan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Atas perbuatan tersebut, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak di subsidi pemerintah antara lain belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT), luasnya wilayah distribusi BBM bersubsidi yang menyulitkan pengawasan, serta modus operandi pelaku yang berupaya menghilangkan jejak dengan mengalihkan atau mendistribusikan BBM ke lokasi tertentu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak, Subsidi.

Law Enforcement Regarding the Criminal Offense of Misusing Government-Subsidized Fuel
(A Study Based on Police Report Number LP/A/31/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM))

Robby Fitrio, 24151050, Bachelor of Laws Study Program, Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities, Dharma Andalas University, 62 pages, 2026

ABSTRACT

This study aims to examine law enforcement regarding the criminal offense of misusing government-subsidized fuel, as well as the obstacles encountered in such enforcement. The research employs a normative juridical method supported by an empirical juridical approach. Data were obtained through literature review and interviews. The results indicate that law enforcement regarding the misuse of government-subsidized fuel is carried out in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP), encompassing the receipt of information, preliminary inquiry, formal investigation, collection of evidence and material evidence, witness examination, seizure, suspect designation, arrest, and detention. The investigation results prove that the suspect purchased subsidized fuel using a "Recommendation Letter for the Purchase of Specific Fuel Types (JBT)" intended for specific fishing vessels, but subsequently diverted the fuel to unauthorized parties and used it for purposes other than those authorized. Based on these actions, the suspects are alleged to have violated Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, as amended by Law Number 6 of 2023. Furthermore, challenges encountered in enforcing the law against the criminal misuse of government-subsidized fuel include suboptimal inter-agency coordination in supervising subsidized fuel distribution, low public legal awareness regarding the use of Purchase Recommendation Letters for Specific Fuel Types (JBT), the vast distribution area complicating oversight, and the perpetrators' modus operandi of attempting to cover their tracks by diverting or distributing the fuel to specific locations

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offense, Fuel, Subsidy.*